

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SINOPSIS	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Manfaat Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	4
F. Kerangka Konseptual	5
1. Demokrasi	7
2. Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Daerah	13
3. Akuntabilitas	18
a. Jenis Akuntabilitas	22
b. Pelaksanaan Akuntabilitas	27
4. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah : ajang konflik kepartaian versus sistem akuntabilitas	33

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian	40
2. Langkah-langkah Konkrit Yang Dilakukan	41
3. Sumber Data	42
4. Cara Menganalisis	43
H. Rencana Sistematika Penulisan Tesis	44

BAB II POLA INTERAKSI ANTARA WALIKOTA DAN DPRD KOTA PAYAKUMBUH

A. Pemilihan Walikotamadya KDH Tingkat II Payakumbuh

1. Pemilihan Umum Tahun 1997	45
2. Komposisi Keanggotaan DPRD Kota Payakumbuh Periode 1997-1999	48
3. Proses Pencalonan dan Pemilihan Walikota Payakumbuh Masa Jabatan 1998-2003	48
4. Profil Mantan Walikota Ketua DPRD Kota Payakumbuh	54

B. Pergeseran Komposisi Keanggotaan DPRD Kota Payakumbuh

1. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999	57
2. Perubahan Politik	63
3. Perubahan Pola Interaksi antara Walikota dan DPRD Kota Payakumbuh (Kasus-kasus ketegangan)	64

BAB III PEMBERHENTIAN DARLIS ILYAS, SH SEBAGAI WALIKOTA PAYAKUMBUH

A.. Kronologis dan Pembahasan Kasus

1. Penolakan Penjelasan/Pertanggungjawaban Walikota
Payakumbuh Terhadap Temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD
Kota Payakumbuh Dalam T.A.1999-2000 68
2. Penolakan Laporan Pertanggungjawaban T.A.1999-2000 73
3. Penolakan Laporan Pertanggungjawaban T.A. 2000 81

B. Proses Pemberhentian Darlis Ilyas, SH Sebagai Walikota

- Payakumbuh 91

BAB IV ANALISA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI SISTEM AKUNTABILITAS 102

- A. Akuntabilitas Administratif/Organisasional 103
- B. Akuntabilitas Legal 108
- C. Akuntabilitas Politik 115
- D. Akuntabilitas Profesional 124
- E. Akuntabilitas Moral 131

BAB V P E N U T U P

- A. Kesimpulan 140
- B. Rekomendasi 143

DAFTAR PUSTAKA145

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Keputusan DPRD Tentang Penolakan Penjelasan/Pertanggungjawaban Walikota Terhadap Temuan DPRD Atas Penyimpangan Yang Dilakukan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Tugasnya	142
2 Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD : Pengambilan keputusan secara aklamasi tentang pemberhentian Walikota	144
3 Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Walikota Payakumbuh	147
4 Hasil Pemeriksaan Itwilprop Sumatera Barat terhadap APBD Kota Payakumbuh T.A.1999-2000 (37 kasus penyimpangan)	149
5 Hasil Pemeriksaan BPKP Sumatera Barat terhadap APBD Kota Payakumbuh T.A.1999-2000 (senilai Rp.1.072.556.444,00,-)	150
6 Surat-surat Walikota kepada DPRD tentang tidak diizinkan pimpinan unit kerja mengikuti Rapat Kerja dengan DPRD	151
7 Risalah Rapat Paripurna DPRD : Pengambilan keputusan secara aklamasi untuk menolak LPJ Walikota T.A.1999-2000 dan Penyelenggaraan PORDA VII Sumatera Barat	155
8 Keputusan DPRD tentang Penolakan Terhadap LPJ Walikota T.A.1999-2000 dan Penyelenggaraan PORDA VII Sumatera Barat	164
9 Risalah Rapat Paripurna DPRD : Pengambilan keputusan secara aklamasi untuk menolak kedua kalinya terhadap LPJ Walikota T.A.1999-2000 dan Penyelenggaraan PORDA VII Sumatera Barat	166
10 Keputusan DPRD tentang Penolakan Kedua Kalinya Terhadap LPJ Walikota T.A.1999-2000 dan Penyelenggaraan PORDA VII Sumatera Barat	174
11 Surat Walikota kepada DPRD tentang LPJ T.A.1999-2000 yang ditolak DPRD tidak efektif untuk diperbaiki karena LPJ tersebut, sudah kadaluarsa	176
12 Perbaikan LPJ Walikota T.A.1999-2000 kepada DPRD (terdiri 3 lembar)..	177

13	Surat-surat teguran dari Mendagri dan Gubernur kepada Walikota	181
14	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi tentang LPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah dan Tolok Ukur Penilaian LPJ Kepala Daerah	191
15	Hasil Pemeriksaan BPK RI Wilayah I Medan terhadap APBD Kota Payakumbuh T.A.2000 (senilai Rp. 2.868.831.170,00,-)	195
16	Surat Wakil Presiden atas nama Presiden perihal Izin Penyidikan Terhadap Darlis Ilyas, SH jabatan Walikota Payakumbuh	196
17	Surat Presiden perihal Tindakan Penyidikan Terhadap Darlis Ilyas, SH jabatan Walikota Payakumbuh	198
18	Risalah Rapat Paripurna DPRD : Pengambilan keputusan secara aklamasi untuk menolak LPJ Walikota T.A.2000	199
19	Keputusan DPRD tentang Penolakan Terhadap LPJ Walikota T.A.2000 ...	205
20	Risalah Rapat Paripurna DPRD : Pengambilan keputusan secara aklamasi untuk menolak kedua kalinya terhadap LPJ Walikota T.A.2000	207
21	Keputusan DPRD tentang Penolakan Kedua Kalinya Terhadap LPJ Walikota T.A.2000	217
22	Tanggapan Walikota tentang Penolakan LPJ T.A.2000 oleh DPRD	219
23	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembebasan Tugas Walikota Payakumbuh dan Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian	228
24	Kliping Surat Kabar Harian Terbitan Lokal tentang Kasus Walikota dan DPRD Kota Payakumbuh	233
25	Surat Pengelola Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pasca Sarjana (S-2) UGM Jogjakarta tentang Izin Penelitian	237
26	Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tentang Izin Melaksanakan Penelitian	238
27	Surat Pemerintah Kota Payakumbuh tentang Izin Melaksanakan Penelitian	239
28	Bio Data Penulis	240